



▶ PERLINDUNGAN PEKERJA

## Kota Jogja Juara Paritrana Award 2025



Istimewa/Dokumen Pemkot Jogja  
 Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X (*kiri*) menyerahkan piagam Paritrana Award 2025 kepada Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo (*kedua dari kiri*), di Gedhong Pracimosono, kompleks Kepatihan, Selasa (14/10).

**K**omitmen Pemkot Jogja dalam memperluas cakupan BPJS Ketenagakerjaan hingga ke sektor informal mengantarkan kota ini meraih Juara Terbaik Pertama Paritrana Award 2025 tingkat DIY kategori Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Posisi terbaik kedua diraih Kabupaten Kulonprogo, sedangkan terbaik ketiga diraih Kabupaten Gunungkidul.

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, dan diterima oleh Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, di Gedhong Pracimosono, kompleks Kepatihan, Selasa (14/10).

KGPAA Paku Alam X mengapresiasi komitmen pemerintah kabupaten/

kota di DIY dalam mendukung perlindungan kesejahteraan pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. “Upaya pemerintah daerah dalam menjamin kesejahteraan para pekerja adalah langkah nyata menghadirkan rasa aman dan keadilan di dunia kerja. Kami sangat mengapresiasi kerja keras seluruh daerah,” ujar Paku Alam X.

Menurut Paku Alam X, Paritrana Award merupakan penghargaan yang digagas oleh Pemerintah Pusat bersama BPJS Ketenagakerjaan untuk mendorong pemerintah daerah, perusahaan, dan pelaku usaha dalam mendukung perlindungan jaminan sosial bagi pekerja. Di DIY, penghargaan ini menjadi

ajang evaluasi dan apresiasi atas komitmen perlindungan tenaga kerja di masing-masing daerah.

“Dengan pemberian penghargaan ini, kami berharap peran pemerintah kabupaten/kota di DIY semakin kuat dalam memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerjanya,” katanya.

Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, berterima kasih atas apresiasi yang diberikan Pemda DIY kepada Pemkot Jogja. Pemkot, menurut Hasto, berkomitmen mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di wilayahnya. “Keberadaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah bentuk kehadiran negara di tengah pekerja. Pemerintah tidak boleh

membiarkan pekerja menghadapi risiko sosial sendirian,” katanya.

Salah satu komitmen Pemkot Jogja adalah memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak hanya untuk aparatur sipil negara (ASN) atau pekerja sektor formal, tetapi juga sektor informal seperti pelaku UMKM, pekerja harian, dan pekerja rentan. “Semua pekerja berhak mendapatkan perlindungan,” katanya.

Ke depan, Pemkot Jogja akan terus berinovasi agar seluruh masyarakat Kota Jogja dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Kami akan terus berinovasi agar seluruh pekerja bisa merasa aman, terlindungi, dan sejahtera,” kata Hasto (*rudy/kusdiyanta\*/*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005